



**KPKNL**  
PADANG



**K  
P  
K  
N  
L** P  
A  
D  
A  
N  
G  
  
2  
0  
2  
3

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Padang Timur – Kota  
Padang, Sumatera Barat Telp.(0751)28299 Fax.(0751)21306

**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>- 6 -</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>- 7 -</b>
<i>LATAR BELAKANG</i> .....	<i>- 7 -</i>
<i>TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI</i> .....	<i>- 8 -</i>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>- 14 -</b>
<i>RENCANA STRATEGIS</i> .....	<i>- 14 -</i>
<i>PERJANJIAN KINERJA</i> .....	<i>- 15 -</i>
<i>PENGUKURAN KINERJA</i> .....	<i>- 17 -</i>
<i>PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA</i> .....	<i>- 17 -</i>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>- 18 -</b>
<i>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i> .....	<i>- 18 -</i>
<i>KINERJA LAINNYA</i> .....	<i>- 40 -</i>
<i>ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO</i> .....	<i>- 44 -</i>
<i>RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2024</i> .....	<i>- 44 -</i>
<i>REALISASI ANGGARAN</i> .....	<i>- 45 -</i>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>- 48 -</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>- 49 -</b>

## PENGANTAR

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2023, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2023 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2023. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem *balance scorecard* (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2023, ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan *full disclosure* pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada

akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta dengan didorong oleh semangat *One Team, One Spirit, One goal*, KPKNL Padang selalu melakukan *continuous improvement* demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

**Kepala KPKNL Padang,**



Ditandatangani secara elektronik

**Ahid Iwanudin**

**NIP 19710226 199803 1 001**



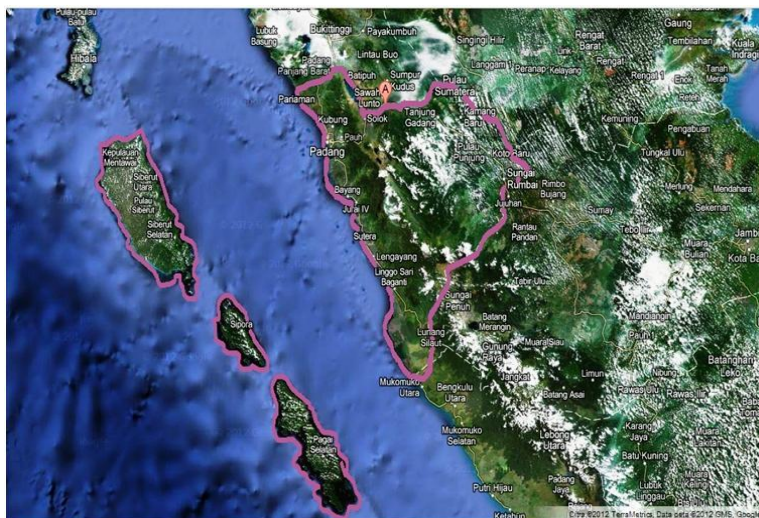
## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di Kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### GAMBAR 1

Wilayah Kerja KPKNL Padang



## BAB I PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2023, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

## TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi, dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang Negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

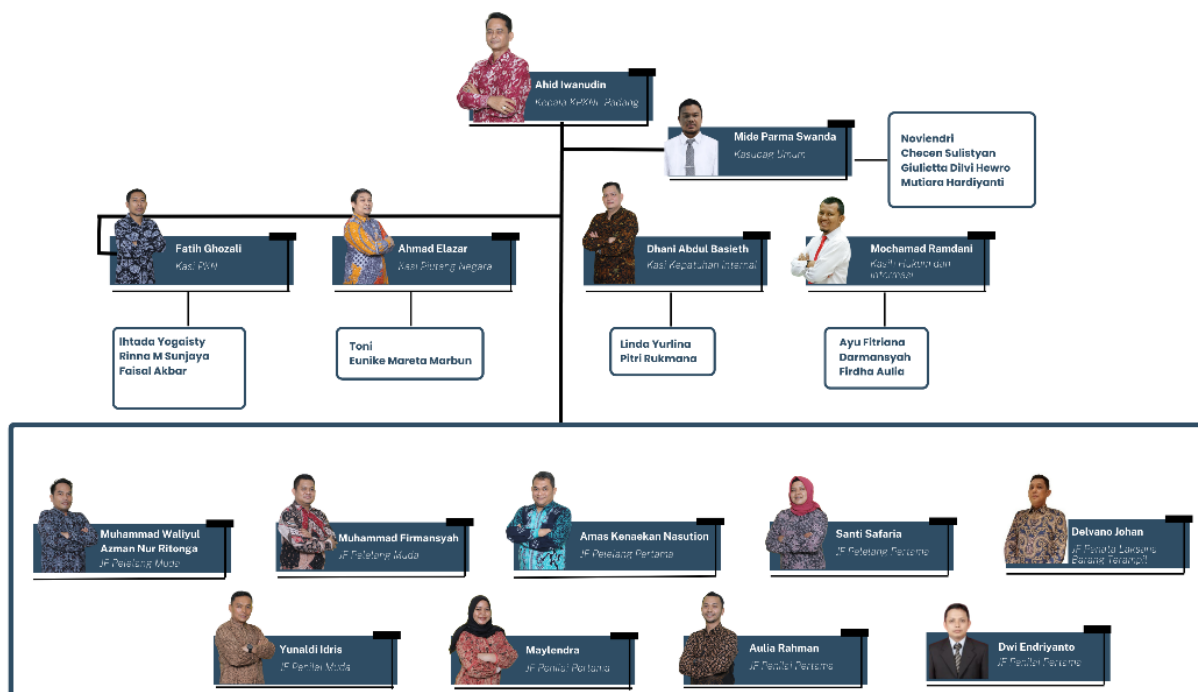
KPKNL Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit Eselon IV dan 1 unit Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sementara Struktur Organisasi KPKNL Padang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

**Bagan Organisasi KPKNL Padang**

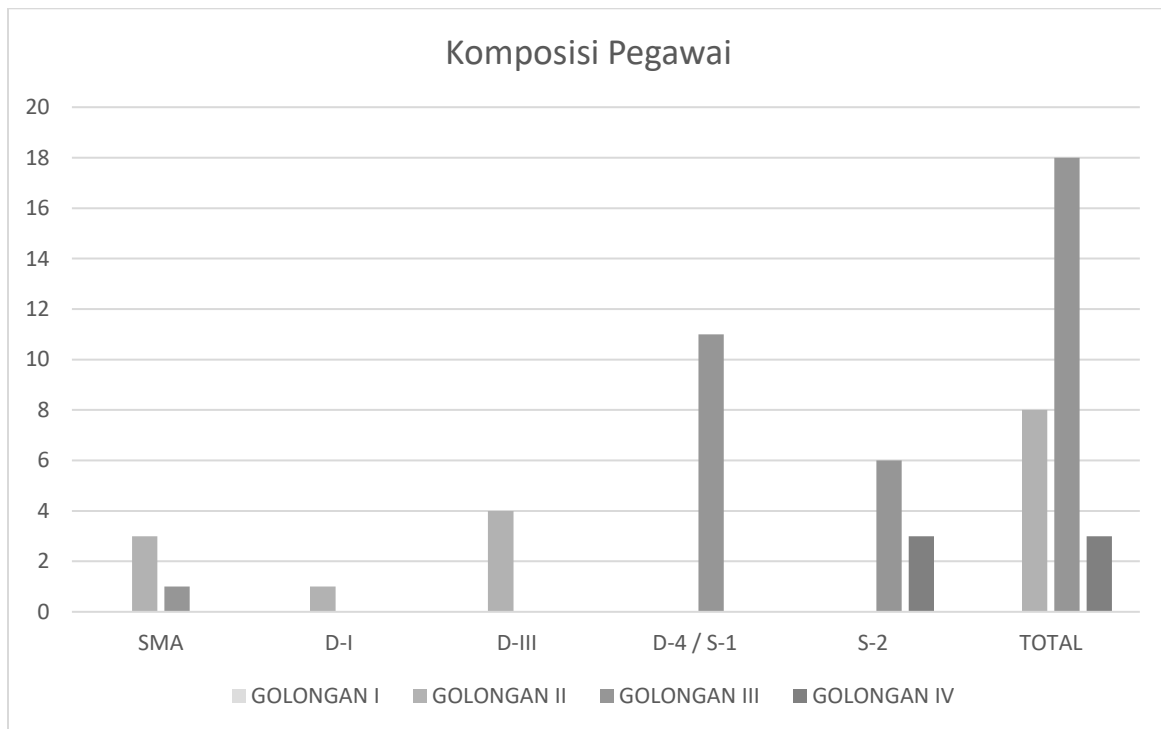


Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Padang, berdasarkan Data per-31 Desember 2023 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 29 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Secara komposisi, pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah 11 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 4 orang, dengan 1 orang diantaranya menduduki golongan III. Sementara lulusan DIII berjumlah 4 orang dan S2 berjumlah 9 orang, dengan tabel sebagai berikut:

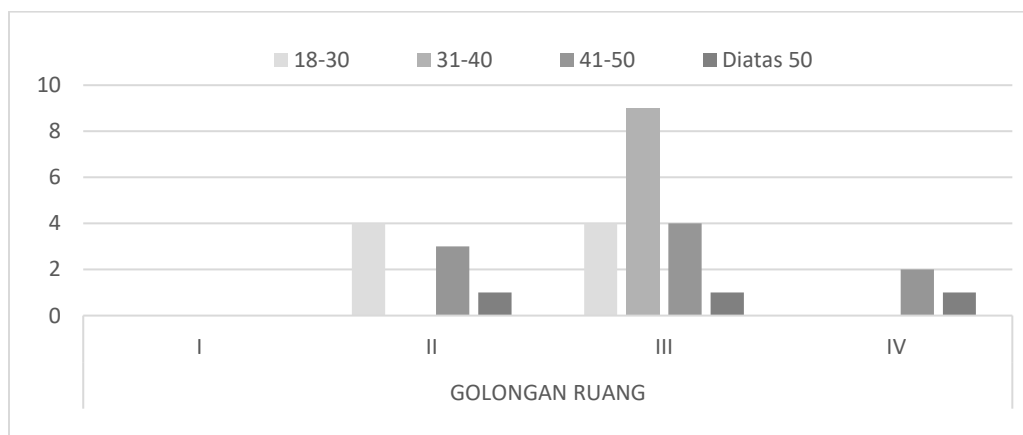
PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SMA	0	3	1	0	4
D-I	0	1	0	0	0
D-III	0	4	0	0	4
D-4 / S-1	0	0	11	0	11
S-2	0	0	6	3	9
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>29</b>



## b. Berdasarkan Umur dan Golongan

Komposisi pegawai KPKNL Padang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, KPKNL Padang akan kehilangan banyak pegawai karena pensiun (usia diatas 50 tahun sejumlah 3 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 8 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 9 orang dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 9 orang

UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	4	4	0	8
31-40	0	0	9	0	9
41-50	0	3	4	2	9
Diatas 50	0	1	1	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>29</b>

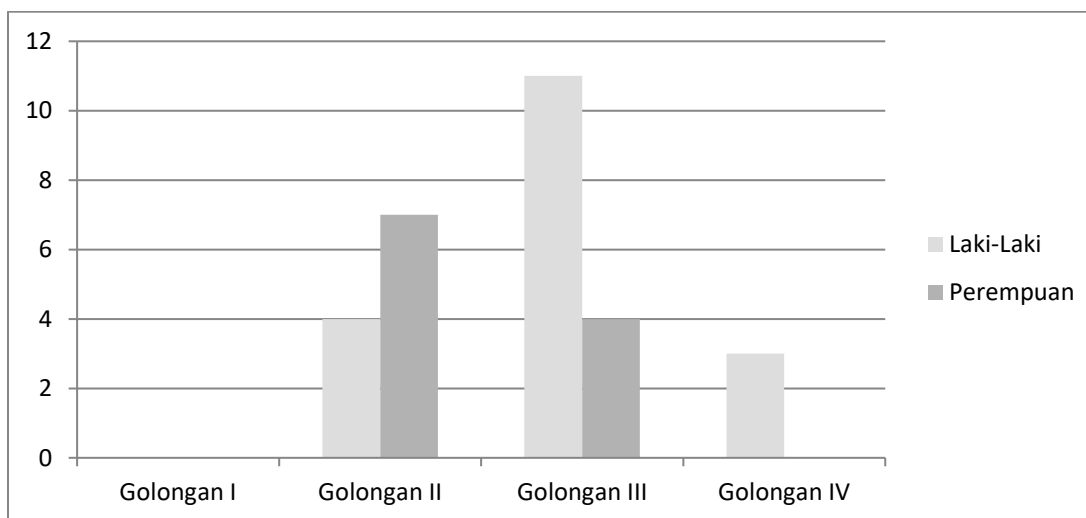


## c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan. Terlihat bahwa pegawai KPKNL Padang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 19 orang, dan 12 orang

perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel seperti di bawah:

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	4	11	3	18
Perempuan	0	7	4	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>29</b>



d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Hingga saat ini KPKNL Padang belum memiliki pejabat fungsional, namun demikian bukan berarti KPKNL Padang tidak dapat menyediakan pelayanan secara maksimal. Sejumlah 9 orang pegawai memiliki kompetensi fungsional, masing-masing dengan kelompok JF Pelelang, JF Penilai, JF Penata laksana barang. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah pegawai dengan kompetensi fungsional.

Unit Kerja	Terampil	Pertama	Muda	Madya	Jumlah
Kelompok JF Pelelang	0	2	2	0	4
Kelompok JF Penilai	0	3	1	0	4
Kelompok JF Penata Laksana Barang	1	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”*

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

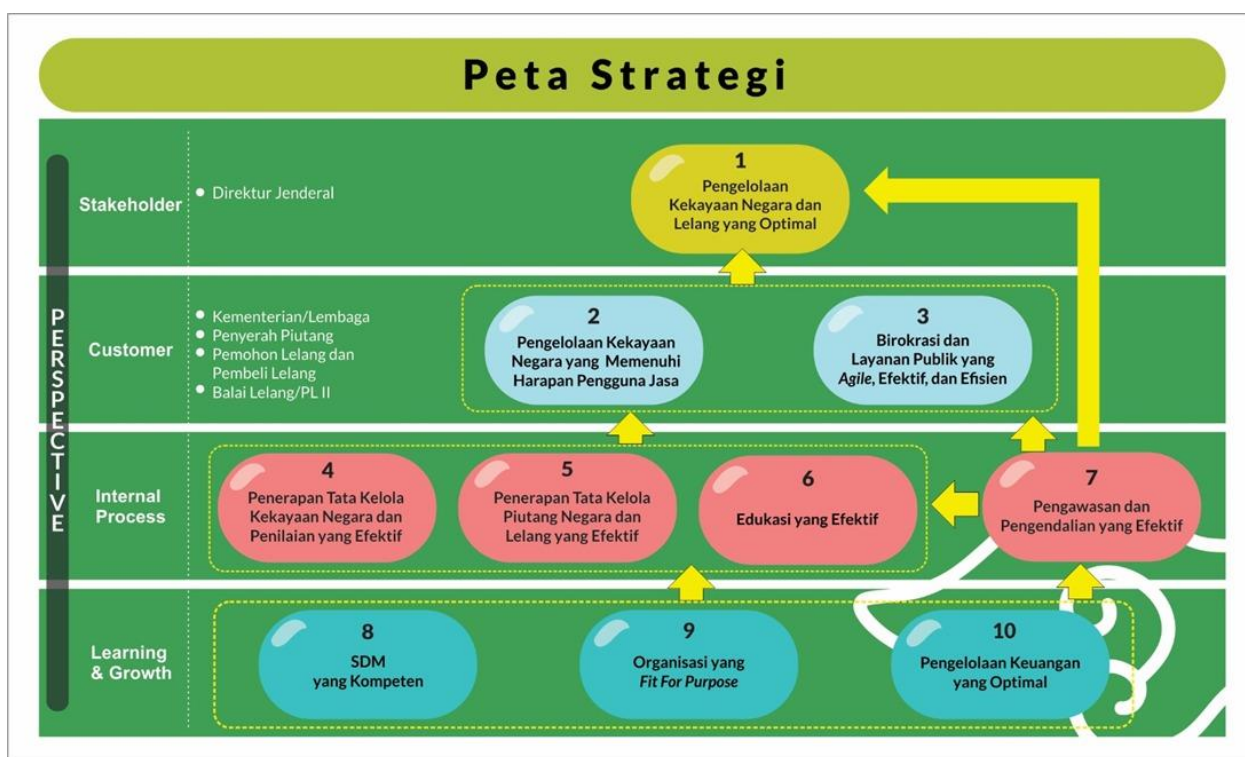
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

## PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2023 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2018, terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).



## KONTRAK KINERJA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		5b-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Konvensional Acution	94%
6.	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		7c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60%
		8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI WBBM	100%
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023

: Rp3.186.404.000

## PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap triwulannya.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reviu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan *feedback* untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 terhadap 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama KPKNL Padang diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang ditentukan. Berikut rincian capaian kinerja atas 9 (Sembilan) IKU KPKNL Padang tahun 2023:

### CAPAIAN KINERJA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	Rp10,940,780,000	Rp13,131,570,248	<b>120,02%</b>
		PKN	PNBP Pengelolaan BMN	Rp5,000,000,000	Rp10,065,990,214	<b>201,32%</b>
		PN	PNBP Piutang Negara	Rp7.193.189	Rp15.542.905	<b>559,69%</b>
		Lelang	PNBP Lelang	Rp5,933,000,000	Rp3,022,036,229	<b>50,94%</b>
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	105%	<b>131,25%</b>
	1c-CP	Indeks Integritas	88.67	89.17	<b>100,56%</b>	
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok lelang PL I: Rp72,560,000,000 Pokok Lelang Pegadaian : Rp51,000,000,000	Pokok lelang PL I: Rp51,126,456,520 Pokok Lelang Pegadaian : Rp49,783,234,700	<b>81,67%</b>
		2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	Rp1,750,000,000	Rp2,506,463,047	<b>143,23%</b>
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023) : 75% Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022 : 25%	Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2023) : 82% Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2022 : 81%	<b>126,05%</b>
		3b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	986	1.198	<b>121,50%</b>

		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	75	106	<b>141,33%</b>
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	1,61%	<b>193,56%</b>
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	93,39	<b>133,42%</b>
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN : 168 Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi : 12	Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN : 147 Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi : 30	<b>120%</b>
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Konvensional Acution	94%	100%	<b>106,00%</b>
6.	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	86%	115,03%	<b>133,75%</b>
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	104,99%	<b>104,99%</b>
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	242,36%	<b>242,36%</b>
		7c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Deviasi Data PNBPLelang : 15% Deviasi Data PNBFPiutang Negara : 15%	Deviasi Data PNBPLelang : 0.00% Deviasi Data PNBFPiutang Negara : 0.00%	<b>200%</b>
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	97,92	<b>163,20%</b>
		8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI WBBM	100	90,00	<b>90%</b>
9.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	<b>120%</b>
		9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	99,71%	<b>124,64%</b>

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	: Rp3.186.404.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	: Rp3.033.028.054
Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2023	: Rp153.375.946

Pada tahun 2023, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,13. Dari 20 IKU terdapat 2 IKU yang capaiannya kuning, yaitu IKU Persentase realisasi pokok lelang dan IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI WBBM. Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 114,79 di tahun 2022. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Three tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2023 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan**

**Dengan Indikator Kinerja Utama:**

**a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

**1) PNBP BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

### 2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

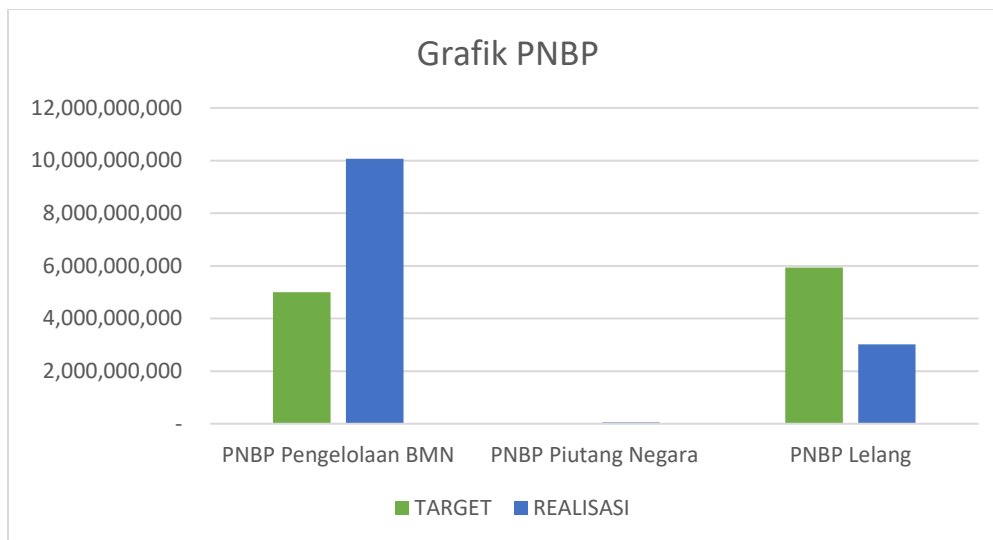
### 3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Keterangan	Target	Realisasi	%
PNBP Pengelolaan BMN	Rp5,000,000,000	Rp10,065,990,214	201,32%
PNBP Piutang Negara	Rp7,780,000	Rp43,543,805	559,69%
PNBP Lelang	Rp5,933,000,000	Rp3,022,036,229	50,94%
<b>Total</b>	<b>Rp10,940,780,000</b>	<b>Rp13,131,570,248</b>	<b>120,02%</b>



### b. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang

Realisasi presentase produktifitas lelang mencapai 105% dari target yang ditetapkan sebesar 80% Sejak tahun 2023 jumlah frekwensi lelang tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah risalah lelang melainkan dihitung berdasarkan jumlah lot barang yang dilelang.

### c. Indeks Integritas

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

## Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa Persentase Realisasi Pokok Lelang

Dengan Indikator Kinerja Utama:

### a. Persentase Realisasi Pokok Lelang”

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 123,56 Milyar.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp51.126.456.520 dari target sebesar Rp72,56 Milyar.
2. Pokok lelang pegadaian mencapai Rp49.783.234.700 dari target Rp51 Milyar. Pokok lelang secara keseluruhan mencapai Rp100.909.691.220 dari target sebesar Rp123,56 Milyar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi pokok lelang PL Kelas I pada KPKNL Padang dalam lima tahun terakhir:

Pokok Lelang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	35.752.000.000	40.000.000.000	53.000.000.000	52.000.000.000	38.000.000.000	123,560,000,000
Realisasi	40.675.581.100	39.666.016.596	29.194.836.581	26.640.097.586	56.933.116.112	100,909,691,220



Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup jauh, hal ini merupakan salah satu dampak dari bencana non alam yakni pandemi Covid-19 dimana kondisi perekonomian terganggu yang mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun. Selain itu, isu terkait bencana alam gempa bumi *megathrust* yang melanda Kota Padang dan sekitarnya juga ikut mempengaruhi penurunan capaian lelang.

#### **b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100% (Rp1,750,000,000)

Pada tahun 2023 KPKNL Padang mendapat target sebesar Rp1,750,000,000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp2,506,463,047. Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk menyelesaikan hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PNDS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	482.500.000	115.344.249	645.757.869	777.933.929	777.933.929	1,750,000,000
Realisasi	206.746.498	263.709.103	767.579.741	808.567.922	1.304.915.503	2,506,463,047

### Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

#### Dengan Indikator Kinerja Utama:

#### a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

"Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara."

#### b. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas

nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

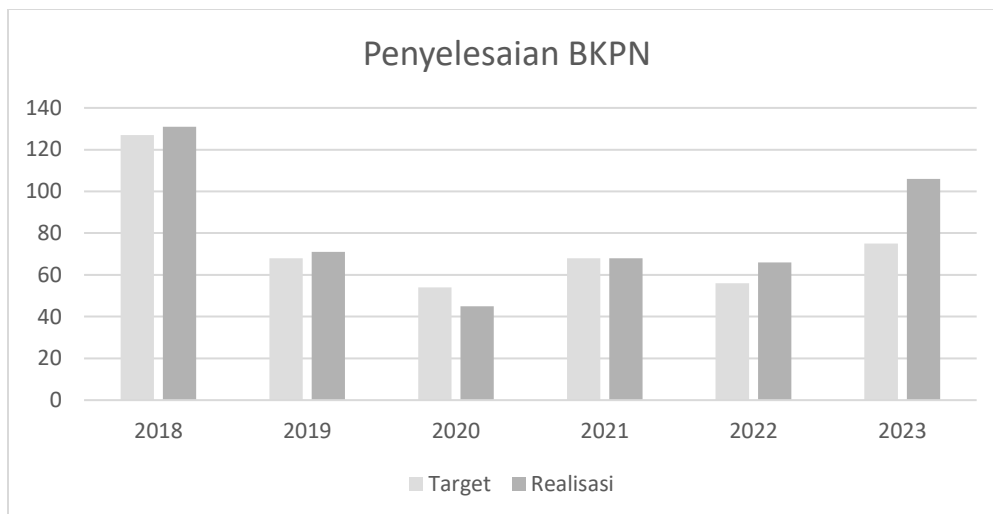
### c. Persentase Penyelesaian BKPN

"IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL)
2. BKPN Penarikan (SPPNS)
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat) Target 100% (15.000 BKPN)

BKPN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	127	68	54	68	56	75
Realisasi	131	71	45	68	66	106



#### **Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

##### **Dengan Indikator Kinerja Utama:**

##### **a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa

persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian."

#### **b. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Efektif dan Efisien**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian

dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
  - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
  - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
  - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
  - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
  - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

### **Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang Yang Efektif**

#### **Dengan Indikator Kinerja Utama:**

##### **a. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

"Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa

mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimbingan teknis, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

#### **b. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Konvensional Auction**

"E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

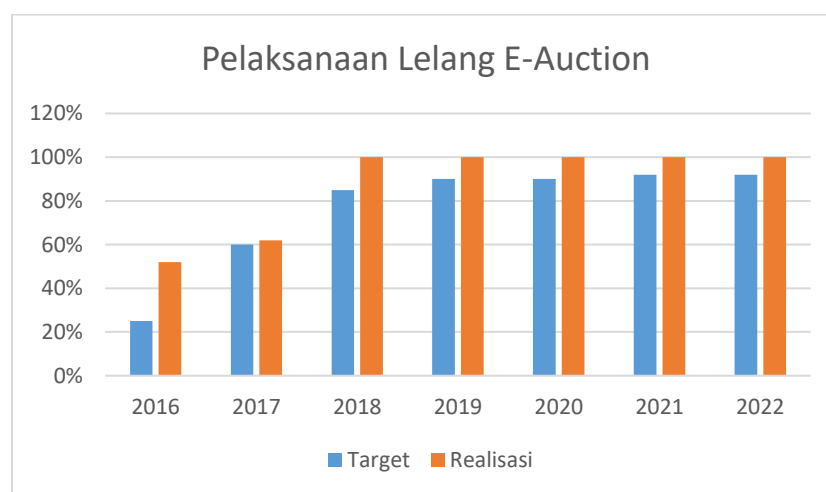
Contoh perhitungan realisasi :

(Capaian e-auction 84%) + (capaian e-conventional 10%) = 94%

(Capaian e-auction 87%) + (capaian e-conventional 7%) = 94%

(Capaian e-auction 94%) + (capaian e-conventional 0%) = 94%"

<i>e-Auction</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	25%	60,00%	85%	90%	90%	92%	92%	94%
Realisasi	52,60%	62,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## Sasaran Strategis 6: Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

### Dengan Indikator Kinerja Utama:

#### a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	2022
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	48
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L	44
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022	48
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023	45

## Sasaran Strategis 7: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

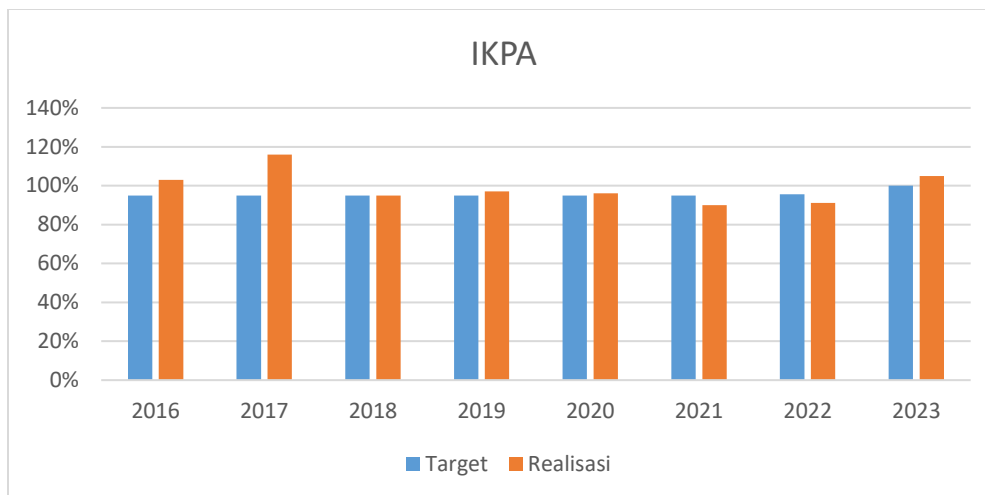
### Dengan Indikator Kinerja Utama:

#### a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Anggaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95,5%	95.5%	100%
Realisasi	103,21%	116,49%	95%	97,29%	96,06%	90,45%	91.21%	104.99%



### b. Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

#### Proses Pengajuan Sertipikasi

1. Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

#### 2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### 3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

##### a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai."

### c. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL merupakan:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%

Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi  
(Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.  
(Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur;  
b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.  
(Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN)"

### Sasaran Strategis 8 : Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

#### a. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

#### **b. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Jumlah unit di lingkungan DJKN yang mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2023 sebagai berikut:

- 25 unit diusulkan WBBM
- 9 unit diusulkan WBK"

### Sasaran Strategis 9 : Organisasi dan SDM yang berkinerja Tinggi

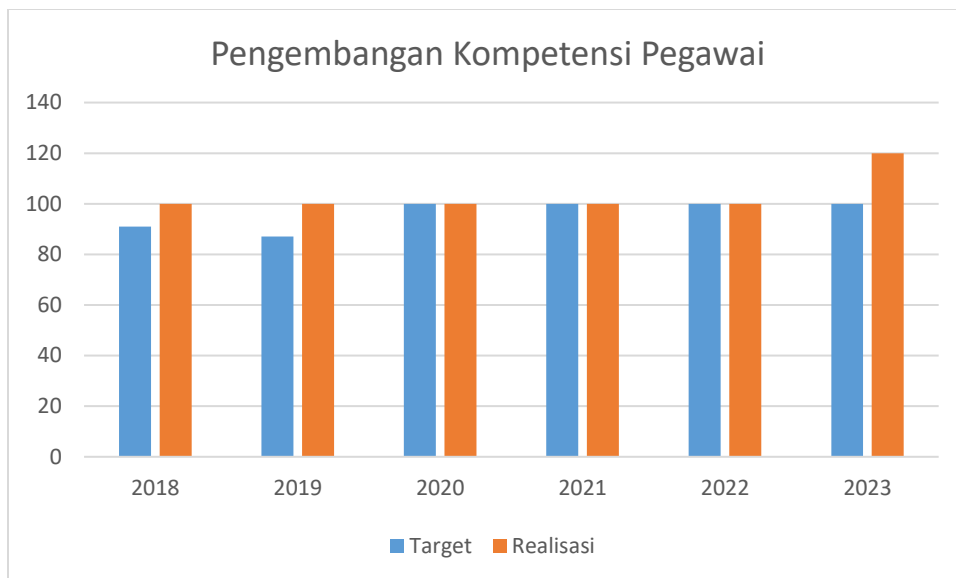
#### Dengan Indikator Kinerja Utama

##### a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya

<i>Hard Competency</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	91	87	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100	120



#### **b. Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut."

#### **KINERJA LAINNYA**

Selain dari 20 (dua puluh) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. 33 debitur mengikuti crash program keringanan utang

Crash Program adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membantu beberapa pihak yang memiliki utang dengan cara memberikan keringanan pembayaran piutang atau crash program. Pihak-pihak yang dimaksud adalah debitur yang jumlah piutangnya bisa dibilang sedikit atau kecil. Tahun 2023 tertotal 33 debitur yang telah mengikuti *crash program* keringanan utang dengan nilai Outstanding BKPN yang telah terbit Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebesar Rp. 1,218,393,500.52,- (Satu milyar dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah ) dan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) dengan nilai CP yang telah dibayarkan oleh 33 debitur yaitu sebesar Rp. 806,108,274.25,- (Delapan ratus enam juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah ) .

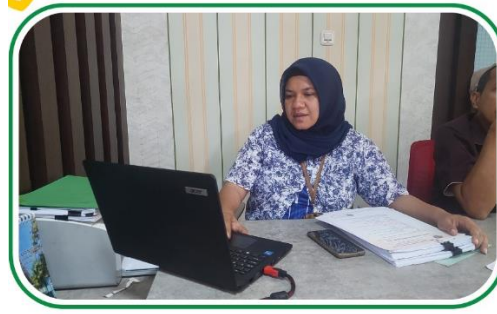
### 2. Penyerahan BKPN RSUP Dr. M Djamil Padang

RSUP Dr. M. Djamil Padang menyerahkan 82 Berkas Kasus Piutang Negara kepada KPKNL Padang dengan nilai outstanding utang sebesar Rp. 1.907.935.687,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan 17 Berkas Kasus Piutang Negara kepada KPKNL Bukittinggi dengan nilai outstanding utang sebesar Rp. 592.553.821,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).



### 3. Pelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN

Aset yang dilelang berupa 2 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Prov Sumatera Barat dengan nilai limit lelang sebesar Rp 620.184.000,- (enam ratus dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan laku secara signifikan dengan capaian Pokok lelang sebesar Rp 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).



#### 4. Pelaksanaan *Capacity Building*

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan KPKNL Padang menuju kantor berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di akhir tahun 2023 KPKNL Padang menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* untuk peningkatan *Service Excellent* dan *Team Work*.

#### 5. Kemenkeu One Goes To Campus

KPKNL Padang bersama Kemenkeu One (Satu) dilingkup Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Kemenkeu Goes to Campus di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat pada Bulan 23 Juni 2023 dengan mengusung tema “Mengenali, Memahami dan Menjaga Keuangan Negara”. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan awareness dan engagement generasi muda terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Masing - masing Instansi Vertikal Kemenkeu Sumbar juga ikut memeriahkan

kegiatan tersebut yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sumbar dan Jambi, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Teluk Bayur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan menyampaikan materi yang terkait dengan tupoksi dari masing-masing instansi.

## 6. KPKNL Padang bersama Kemenkeu Satu Sumbar berkolaborasi dengan Bank BRI Kantor Wilayah Padang menggelar Lelang Expo 2023

Lelang Expo 2023 dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhadap UMKM di Sumatera Barat. Pembinaan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong aktivitas ekonomi UMKM, mendekatkan masyarakat umum dengan lelang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sekaligus instrumen bagi Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya di Sumatera Barat

Dalam kegiatan tersebut seluruh Cabang BRI dibawah Wilayah kerja BRI Kanwil Padang ikut juga berpartisipasi, masing-masing Cabang mempromosikan kepada pengunjung Objek lelang apa yang ada di Cabang mereka. Pada acara ini dilakukan Lelang UMKM dan Lelang Amal yang diikuti oleh tamu undangan dan masyarakat umum. Acara ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai lelang dan eksistensi dari pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya, adapun total penjualan lelang amal kali ini adalah sebesar ±Rp 18.260.000,-, Adapun kegiatan lain diantaranya Talkshow Mengusung Tema “Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Maju” di Sumatera Barat.

## 7. Penguasaan fisik berupa pemasangan plang sita atas aset barang jaminan milik debitur eks BDL

Aset tersebut berupa dua buah bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 103 m2 dan 114 m2 yang terletak di lokasi strategis di kota Padang, tepatnya berada di Jalan Dobi, RT.002/RW.001, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat



## ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2023 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2023. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan reviu capaian kinerja

dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2023 adalah 112,13. Namun terdapat 2 (dua) buah IKU yang capaiannya kuning yaitu Persentase realisasi pokok lelang dan Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Pembangunan ZI WBBM. Hal ini disebabkan Terdapat Keterlambatan Data Kontrak Triwulan III yang disebabkan oleh lamanya respon pegawai KPPN terhadap kontrak yang diajukan dan sulitnya menyesuaikan realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana.

## RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2024

Memasuki tahun 2024 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2024:

1. Melaksanakan rapat persiapan Sertifikasi BMN
2. Melakukan sosialisasi terkait SBSK
3. Melakukan sosialisasi PMK Lelang No 122 Tahun 2023
4. Melaksanakan penggalian potensi lelang
5. Melakukan pemanggilan Debitur dan Penerbitan Surat Paksa
6. Melaksanakan Rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan pihak Penyerah Piutang
7. Melakukan Peer Review untuk menghasilkan nilai yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan
8. Melakukan edukasi ke satker bersama seksi PKN terkait usulan nilai yang diajukan dalam kaitannya dengan pengelolaan BMN
9. Memastikan seluruh penyelesaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan SOP atau lebih cepat dari SOP
10. Melakukan monitoring terhadap kewajiban pegawai dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN
11. Melakukan koordinasi dengan pihak legal perbankan terkait gugatan pelaksanaan lelang
12. Melakukan monitoring Pelaksanaan Anggaran secara triwulan Januari - Maret 2024
13. Melakukan koordinasi dan verifikasi keseluruhan seksi dan kelompok jafung untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang disusun

## REALISASI ANGGARAN

## Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang

Pada tahun 2023, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp3.186.404.000. Dan hingga akhir 2023, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp3.033.028.054 atau total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 95,19%.

## DATA PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT

## KPKNL PADANG

## PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	RINCIAN OUTPUT	Pagu Akhir	Realisasi Anggaran
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	81,000	-
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3,848,000	3,810,000
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	33,885,000	29,557,192
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	13,666,000	12,150,000
4798.AAH.003	Risalah Lelang	14,954,000	14,926,000
4798. AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40,000,000	9,500,000
4798.FAE.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	25,335,000	43.000
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	118,140,000	99,857,885
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	21,864,,000	20,621,996
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	59,750,000
4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	51,495,000	39,602,000
4700.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	46.354.000	43.670,000

4701.UAK.201	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	129,214,000	84,533,942
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	25,395,000	25,230,000
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	59.496,000	56.361.320
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.633.521,000	1.589.265.420
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	75.446,000	75.300.000
4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	812.795,000	812.607.376
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	8,446,000	5,854,400
4702.BMB.002	Kehumasan	4,484,000	4,483,000
4704.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7,941,000	4,625,000

## DATA CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

## KPKNL PADANG

## PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	KRO / RO	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	CRO
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	60	Orang	95	1.58
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	35	Orang	154	4.40
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Lelang	35	Orang	0	0.00
4798.AAH.001	Keputusan Pemohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	150	Surat Persetujuan	261	1.74
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	50	BKPN	289	5.78
4798.AAH.003	Risalah Lelang	320	Risalah	699	2.18
4798.AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM	20	Risalah	22	1.10
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	984	Sertipikat	1.193	0.00
4798.FAE.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	167	Rekomendasi	177	1.06
4798.FAE.003	Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar	1487	Rekomendasi	2.259	0.00
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	1	1.00
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	53	53.00
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	1	Rekomendasi	52	52.00
4700.FAK.001	Pengelolaan Aset BUN	10	Aset	12	1.20
4701.UAK.201	Aset Eks BLBI yang dilakukan penanganan, penyelesaian, dan	20	Aset	2	1.00
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	20	Perkara	56	2.80
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12	Layanan	12	1.00
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	12	1.00
4704.EBA.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	9	Unit	15	1.67
4701.EBB.004	Gedung/Bangunan	350	m2	350	1.00
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	2	Kegiatan	2	1.00
4702.BMB.002	Kehumasan	60	Kegiatan	478	7.97
4704.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Rekomendasi	7	1.4

## PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO

## KPKNL PADANG

## BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian		Pagu Akhir (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>Pagu Bruto</b>		<b>3.186.404.000</b>	<b>3.033.028.054</b>	<b>95,19%.</b>
<b>Faktor Pengurang</b>				
a.	Belanja Pegawai	-	-	
b.	<i>Self Blocking</i>			
c.	Hasil Efisiensi		153.375.946	
d.	Dana Khusus	-	-	
<b>Penyerapan Anggaran Neto</b>		<b>3.033.028.054</b>	<b>2.879.652.108</b>	<b>94.94%</b>
<b>Trajectory Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV</b>				<b>95%</b>
<b>Capaian Indikator Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV</b>				<b>99.94%</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2023 yang disusun untuk memenuhi asas good governance serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervise atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani di tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2023, hambatan eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

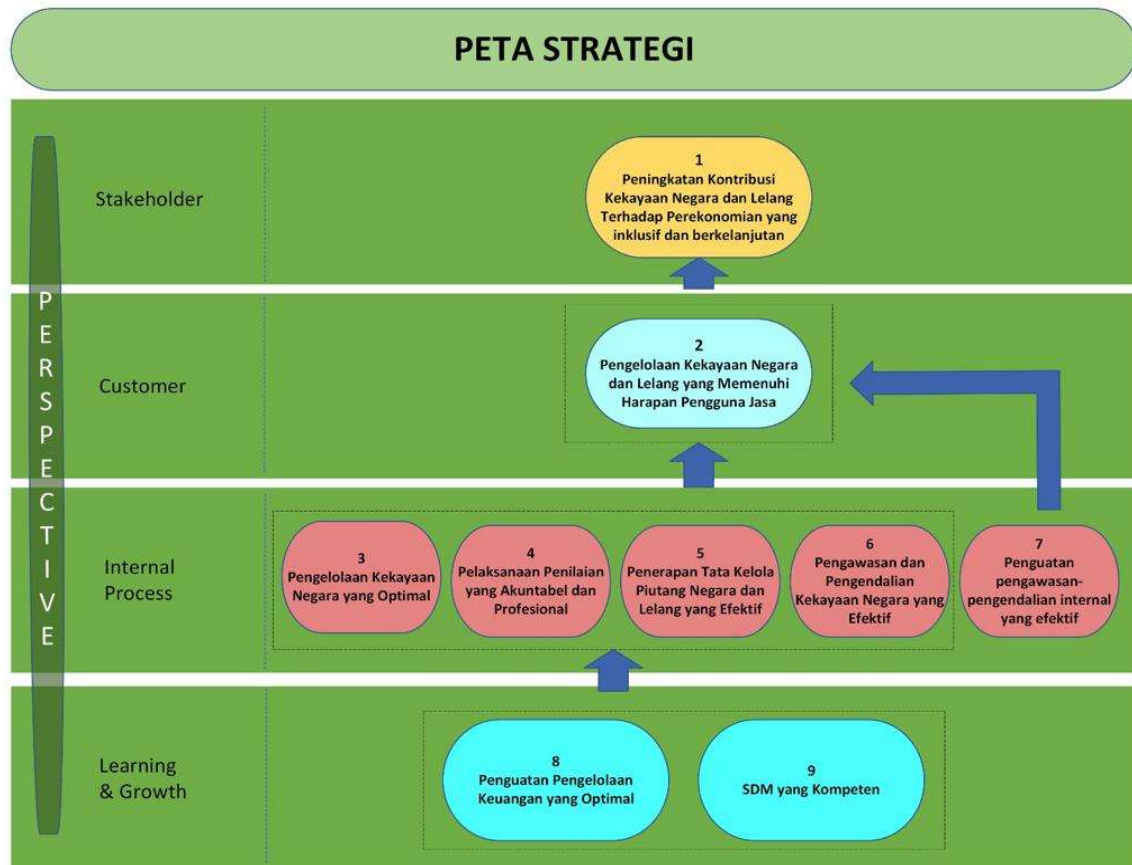
Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2023 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada stakeholder terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap feedback dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas good governance dan bebas KKN.

## LAMPIRAN

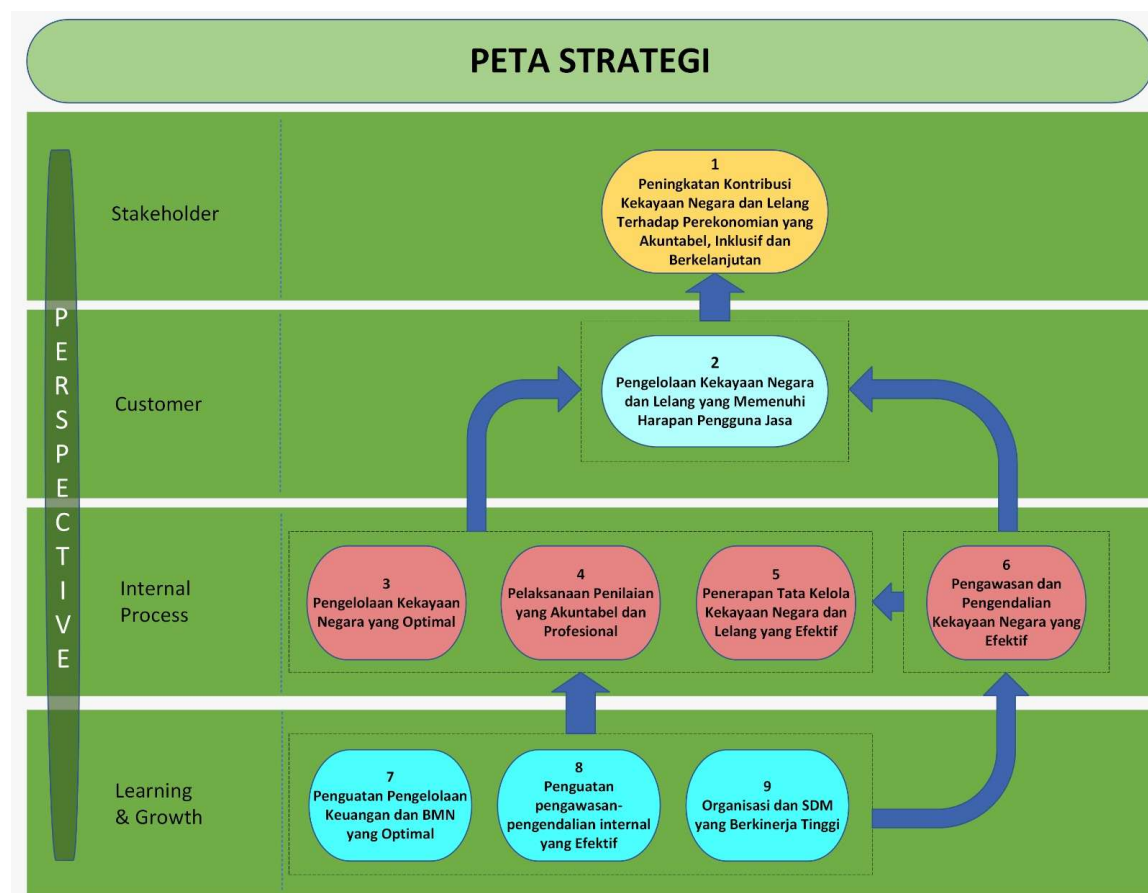
## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-01A/KN.15/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor : PK-01/KN.15/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### Peta Strategis sebelum adendum:



### Peta Strategis setelah adendum:



**a. Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

**b. Perubahan Nama IKU**

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**c. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<i>Internal Process Perspective</i>						<i>Internal Process Perspective</i>					
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
<i>Internal Process Perspective</i>						<i>Learning and Growth Perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5a-CP	Deviasi Data PNBPNFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	7c-CP	Deviasi Data PNBPNFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
<i>Learning and Growth Perspective</i>						<i>Stakeholder Perspective</i>					
8	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
8a-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67

**d. Penambahan IKU**

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d.Q3	Q4	Y	
-	5b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	IKU <i>cascade</i> ditambahkan bersumber dari IKU Kemenkeu-Two

**e. Penghapusan IKU dan Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Padang

**f. Perubahan Trajectory Target IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
7b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	7b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

**g. Perubahan Kode IKU dan Sub IKU**

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
7b-CP	7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
8d-N	8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau,  
Sumbar dan Kepri

Pekanbaru, 26 September 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Padang



Ditandatangani secara elektronik  
Wahyu Prihantoro



Ditandatangani secara elektronik  
Ahid Iwanudin



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase produktivitas lelang	80%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal dan Anggaran
8.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Capaian unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal dan Anggaran

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase produktivitas lelang	80%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	88,67	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal dan Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
8.	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Capaian unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal dan Anggaran

## B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

### Skema pertanggungjawaban

#### 1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase produktivitas lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase produktivitas lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
6	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%	7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%
8	Evaluasi Kinerja BMN ( Fortofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60	100%	100%

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70
11	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	11	Persentase Evaluasi Kinerja BMN ( Fortofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	86%	86%	12	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
13	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	86%	86%
14	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	100%	14	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	95,5	95,5	100	100
15	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	100%
16	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	100%	100%	16	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
17	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	100	100	17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	100%
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	60	60	18	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	60	60
19	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	19	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80

Addendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat,  
dan Kepulauan Riau



Ditandatangani secara elektronik  
Wahyu Prihantoro

Pekanbaru, September 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Padang



Ditandatangani secara elektronik  
Ahid Iwanudin

# **TIM PENYUSUN**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan**

**KPKNL Tahun Anggaran 2023**

**Penanggung Jawab : Kepala Kantor ( Ahid Iwanudin )**

**Ketua : Kasi HI ( Mochamad Ramadani )**

**Penyusun : Tim HI**

- 1. Guziariel Zul**
- 2. Darmansyah**
- 3. Resti Vita Masyuko**
- 4. Excelia Dadela**

**Kontributor :**

- 1. Kasubang Umum ( Mide Parma Swanda )**
- 2. Kasi PKN ( Fatih Ghozali )**
- 3. Kasi PN ( Ahmad Elazar )**
- 4. Kasi KI ( Dhani Abdul Basieth )**